



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SYIAH KUALA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HIZIR
2. Jabatan : DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA
3. NHK : 277424

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **973.706.885**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 299 m2/128 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 810.337.500
2. Tanah dan Bangunan Seluas 484 m2/75 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 134.142.635
3. Tanah Seluas 4.552 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 29.226.750

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **217.320.000**

1. LAINNYA, POLYGON SEPEDA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 1.142.000
2. LAINNYA, PACIFIC SEPEDA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 678.000
3. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER CROSS 1.5L PLUS 4X2 A/ Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 215.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **229.511.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **261.871.132**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **1.682.409.017**

III. HUTANG **Rp.** **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **1.682.409.017**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.